

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa)

Leni Nurul Kariyani^{1✉}, Rahmawati², Joni Firmansyah³

^{1,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa

²Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Paracendikia NW Sumbawa

Correspondence Author: [leni.nurul.kariyani@uts.ac.id✉](mailto:leni.nurul.kariyani@uts.ac.id)

Article History

Received : 2023-03-18

Accepted : 2023-05-17

Published : 2023-06-25

Keyword:

Implementation, Local government, community welfare

Abstract: This study aims to find out how the efforts made by the village government in improving the welfare of the community through policies made by the village government for the community. This research was conducted in the village of Lantung. Lantung village is one of the villages in the Lantung sub-district with a population of 892 people and almost all of the population are farmers. The method used in this research is descriptive qualitative research method. And the results of the research that has been done is that with the cattle distribution program in Lantung village it was found that there were 2 things, namely the first implementation of the cattle program was very useful and assisted by the existence of village regulations and village head decrees so that it became a provision for the community in the implementation of the program, the two human resource factors in their implementation are quite good and need to be improved in the future, especially in terms of technology-based data collection.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaima upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintaha desa untuk masyarakatnya adapun penelitian ini dilakukan di desa lantung Desa lantung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Lantung dengan jumlah penduduk mencapai 892 jiwa dan hampir semua penduduknya adalah petani. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif kualitatif . Dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dengan program pembagian sapi di desa lantung yang ditemukan ada 2 hal yaitu yang pertama implementasi dari progam sapi sangat bermanfaat serta dibantu dengan adanya aturan Peraturan desa dan surat keputusan (SK) kepala desa sehingga menjadi ketentuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan programnya, kedua faktor sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya cukup baik dan perlu ditingkatkan untuk kedepannyanya terutama dalam hal pendataan berbasis teknologi.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Salah satu program unggulan Desa Lantung dalam bidang pembangunan desa Lantung yaitu program penyaluransapi bibit kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana program ini berjalan pada tahun 2017 dan dananya berasal dari APBDes (Anggaran Perbelanjaan Desa). Pada gelombang pertama tahun 2017 program penyaluran sapi bibit kepada masyarakat yang menerima bantuan sapi ini sebanyak 10 ekor per Kartu Keluarga (KK), dan gelombang kedua pada tahun 2018 yang sama sebanyak 30 ekor, serta gelombang ketiga tahun 2019 bantuan sapi sebanyak 30 ekor. Masyarakat yang menerima bantuan sapi ini terikat dengan surat perjanjian sebelum menerima bantuan sapi ini dari pemerintah Desa Lantung yang mana salah satu isi perjanjiannya adalah anak pertama dari sapi yang diterima akan digulirkan kepada warga yang belum mendapatkan jatah sapi atau yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Berdasarkan latar belakang masalah telah diuraikan tersebut, terdapat masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah desa lantung. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Desa Lantung tentang pembagian sapi ternak sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah Desa Lantung tentang pembagian sapi ternak sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tentang pembagian sapi ternak di desa Lantung ini merupakan program desa yang paling awal terkait pembagian sapi yang ada di kabupaten Sumbawa. Program ini berdasarkan Dana Desa dengan APBDes yang di sepakati dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa secara bersama-sama. Program pembagian sapi ini juga diikuti oleh beberapa desa seperti Desa Aimual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas dan lainnya. Dalam penelitian ini data yang disajikan melalui wawancara langsung. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat update atau data langsung dari sumber yang diteliti yakni orang yang mengetahui secara detail. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan (pengamatan), dokumentasi, dan wawancara (interview). Adapun jenis data metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis (Sugiyono, 2014). Data-data dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan topik pembahasannya. Data yang telah diklasifikasikan tersebut, kemudian dipilah kembali dan di reduksi untuk memperoleh intisari dari data-data yang telah diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif yakni menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Oleh karena itu, data yang akan dianalisis ialah data-data dokumentasi yang sudah terkumpul dan dari hasil wawancara serta observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Pemerintah Desa Lantung

Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyaluran sapi bibit desa lantung dalam penerapan implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut sangat berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang erat dalam sebuah kebijakan dan sangat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan. Jadi untuk mensukseskan kebijakan yang diambil maka keempat faktor ini harus dilakukan dengan baik oleh pelaku kebijakan.

Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan pemahaman yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan hal tersebut. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Pada program penyaluran sapi bibit kepada cara pemerintah melakukan komunikasi kepada masyarakat yaitu dilakukan cara mensosialisasikan kebijakan yang diinginkan dan dilakukan pula di dalam forum pertemuan. Di luar forum pemerintah desa melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait kebijakan yang diinginkan, dan dalam mensosialisasikan program sapi bibit mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat yang kemudian dimasukkan dalam forum musyawarah dusun (Musyodus) dan musyawarah desa (Musyodes) yang pada akhirnya disepakati bersama segala aturan-aturan terkait penyaluran sapi bibit di desa lantung. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Erik Bastian selaku salah satu

Penerima Sapi dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan semua elemen masyarakat memiliki hubungan yang harmonis sehingga komunikasinya bisa dilakukan dengan berbagi cara dari masyarakat ke pemerintah dan begitu pula sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat dalam forum musyawarah formal maupun tidak formal

Sumber Daya

Komponen sumber daya manusia pada desa ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Pada pemerintahan desa lantung sumber daya manusia yang ada melakukan tugasnya dengan baik dan program-program kebijakan yang dibuat dengan prosedur yang teratur dengan baik. Salah satu program yang dihasilkan yaitu program penyaluran sapi bibit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan program yang sangat pas untuk masyarakat yang dimana di desa lantung sendiri mayoritas masyarakat disana adalah petani sehingga dalam bertani warga bisa beternak juga, dan hanya 1 kali panen dalam setahun dan dari hal itu pada musim kemarau masyarakat bisa merawat sendiri atau melepas di wilayah pertanian dan wilayah hutan di desa lantung. SDM di desa lantung sudah sangat baik kerja sama antara pemerintah dan masyarakat karena dapat melihat kekurangan yang ada kemudian melakukan segala usaha untuk mengatasi hal tersebut dengan kebijakan yang dibuat bersama forum musyawarah. Pada program penyaluran sapi bibit kepada masyarakat yang sangat berperan penting dalam pembuatan kebijakan adalah pemerintah desa yang mengurus dari awal terkait segala hal tentang program kebijakan yang diterapkan serta mengawal jalannya program tersebut hingga sukses berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari wawancara yang dilakukan

dengan Hendrajit Arya Putra selaku Tokoh Pemuda dapat disimpulkan bahwa program pembagian sapi desa Lantung sangat searah dengan kondisi masyarakat desa lantung sebagian besarnya adalah petani dengan sumber daya alam atau lahan yang ada. Namun dalam sumber daya manusia khususnya staff desa masih diperlukan perkembangan untuk menghadapi kondisi masyarakat perkembangan teknologi dengan mengasah perngetahuan di bidang teknlologi.

Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di program penyaluran sapi bibit kepada masyarakat di desa lantung sikap dari pemerintah desa serta pihak yang terkait seperti BPD dan TPK sangat baik dalam menerima masukan, arahan serta saran dari atas yaitu Kepala Desa dan BPD maupun dari bawah yaitu masyarakat di luar forum maupun di dalam forum. Bapak Rudi Satriawan merupakan kepala desa lantung sekaligus orang yang mencetuskan program penyaluran sapi bibit mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pembuatan, pemrosesan, pengawalan dan analisa dari program kebijakan tersebut. TPK desa lantung dalam melakukan tugasnya dalam program penyaluran sapi bibit sangat baik dari proses penerima kembali anak pertama sapi dari masyarakat yang menerima sapi bibit kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang belum kena. Komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak terkait program penyaluran

sapi bibit ini sangat baik sehingga jalannya sebuah kebijakan baik pula, serta sikap pihak-pihak yang dari atas sampai kebawah dari pelaku kebijakan sangat profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sikap masyarakat terkait program penyaluran sapi bibit ini sangat baik penerimaannya terkait segala aturan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah yang dimana salah satu aturannya mengembalikan anak sapi pertama dari sapi bibi yang di berikan kepada pihak sudah banyak yang melakukan pengembalian tersebut. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Iwan Kurniawan selaku ketua TPK dapat disimpulkan bahwa sikap dari TPK desa lantung sangat baik karena menerima semua bentuk masukan dan saran yang diberikan atasannya yaitu Kades lantung yang dimana semua itu demi berjalan dengan baiknya program pembagian sapi tersebut

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dll. Pemerintah desa Lantung terdiri dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewajiban tersendiri dalam mengelola desa. Pada program penyaluran sapi bibit desa lantung pemerintah desa terkhususnya pihak-pihak yang terkait memiliki tugas masing-masing. Selain itu, ia juga seorang pimpinan yang sekaligus pemimpin. Oleh karena itu, ia juga menjadi pengambil keputusan dalam setiap kebijakan dan program di tingkat desa. Kepala desa merupakan orang memiliki kewenangan dalam memberikan intruksi TPK maupun pihak lain yang terkait dalam jalannya program penyaluran sapi bibit, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) adalah badan memiliki tugas untuk menyalurkan sapi bibit kepada masyarakat dan menerima pengembalian sapi bibit dari penerima sapi bibit sebelumnya yang kemudian di salurkan kembali kepada masyarakat yang belum kena dan yang melakukan pengawasan dalam program penyaluran sapi ini adalah BPD (Badan Pemusyawaratan Masyarakat) dan masyarakat setempat. Pada program

penyaluran sapi bibit desa lantung pemerintah desater khususnya pihak-pihak yang terkait memiliki tugas masing-masing. Kepala desa merupakan orang memiliki kewenangan dalam memberikan intruksi TPK maupun pihak lain yang terkait dalam jalannya program penyaluran sapi bibit. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sarafuddin selaku Kasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pemerintahan desa lantung melakukan tugas, hak dan kewajibannya dengan baik sehingga tercipta sinergitas di antara para pemangku kebijakan maupun pihak-pihak yang terkait dalam program kebijakan desa khususnya pada program pembagian sapi di desa lantung.

Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sapi Bibit Desa Lantung

Salah satu kebijakan yang di buat pemerintah desa Lantung pada tahun 2017 yaitu penyaluran bantuan sapi bibit kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun desa. Dana yang digunakan dalam program penyaluran sapi bibit kepada masyarakat ini bursumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari desa Lantung sendiri. Pemerintah Desa Lantung dalam merumuskan masalah-masalah yang ada bisa dilakukan secara langsung dan musyawarah. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan Musrembang dusun (Musdus) di masing-masing dusun yang ada di Desa Lantung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dimasing-masing dusun, Setelah dikumpulkan masalah-masalah yang ada kemudian dianalisa permasalahan tersebut untuk kemudian dipilih beberapa masalah yang sangat penting untuk dimasukan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk dicarikan solusinya dalam musyawarah. Setelah di lakukan Musdus dan Musdes kemudian ditetapkan program prioritas yang penyusunan anggrannya di lakukan oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya disetujui oleh BPD. Anggaran Program penyaluran sapi bibit berasal dari APBDes yang dialokasikan dari Dana Desa Lantung yang telah pembahasan dan penyusunannya dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan

aturan yang ada. Program penyaluran sapi berlaku tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan Dana Desa yang berbeda-beda dan anggarannya pun berbeda. Penjelasan anggaran APBDes tentang program penyaluran sapi sebagai berikut.

Untuk pelaksanaan program penyaluran sapi bibit ini pemerintah desa musyawarah bersama BPD untuk membuat peraturan desa tentang ketertiban yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada kemudian dikeluarkanlah Perdes Nomor 03 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Ketertiban Sapi Bibit di Desa Lantung. Adapun dalam Perdes yang dihasilkan menimbang 2 hal yaitu:

1. bahwa di Desa Lantung telah ada program melalui APBDes tentang pengadaan Sapi untuk masyarakat. bahwa sebagai prioritas utama sebagaimana dimaksud huruf a diatas untuk pelaksanaan kegiatan di Desa perlu dibuat peraturan desa tentang ketertiban yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Pengembangan dan Ketertiban Sapi Bibit di Desa Lantung pemerintah desa dalam aturannya beracuan terhadap aturan dari Kabupaten dan Provinsi. Dalam Peraturan Desa Nomor 03 tentang Pengembangan dan Ketertiban Sapi Bibit ditetapkan "Pengembangan dan Penerimaan Bibit Sapi Di Desa Lantung Tahun Anggaran 2017." Setelah Peraturan Desa Nomor 03 tentang tentang Pengembangan dan Ketertiban Sapi bibit kemudian dikeluarkan pula Surat Keterangan (SK) Nomor 03 tahun tentang Pemeliharaan Bibit Sapi Desa Lantung Kecamatan Lantung Tahun 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Lantung bapak Rudi Satria tentang penyaluran sapi dibuat pada tahun 2017 bulan april tanggal 10. SK tentang penyaluran sapi tersebut merupakan kertentuan-kertentuan untuk mendukung program penyaluran sapi kepada masyarakat agar berjalan dengan baik dan teratur dalam rangka mensukseskan program penyaluran sapi tersebut. Dalam surat keterangan tentang penyaluran sapi bibit yang dikeluarkan Kepala Desa Lantung dan menimbang 2 hal yaitu:a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelancaran tugas bagi pengurus Sapi Bibit Desa Lantung,

maka perlu ditetapkan struktur kepengurusan dimaksudkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Lantung Dalam Surat Keterangan tentang sapi yang dikeluarkan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2017 tentang Pemeliharaan Bibit Sapi Desa Lantung Kecamatan Lantung ditetapkan 3 hal yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur Kepengurusan Sapi Bibit Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- b. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun.
- c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat sejak tanggal 10 April 2017

KESIMPULAN

Program Pembagian Sapi Bibit Kepada Masyarakat di desa Lantung adalah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat lumayan berhasil. Pada program pembagian sapi ini pemerintah desa mengeluarkan aturan seperti peraturan desa, SK kepala desa serta Surat Perjanjian yang dimana hal tersebut membantu dalam menertibkan dan menjaga keberlangsungan program pembagian sapi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai yang diinginkan Pemerintah dan Masyarakat. Dengan program ini pula masyarakat terbantu dalam perekonomian yang dimana sapi tersebut menjadi rekening hidup bagi masyarakat yang bisa di gunakan waktu dibutuhkan nantinya. Pada program sapi ini sumber daya manusia di desa lantung yaitu pemerintah masih butuh perkembangan dalam mengelola data berbasis teknologi untuk menghadapi perkembangan zaman yang makin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

Edward, George C, III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington Dc: Texas A & M University. Congretional Quarterly Press.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press.

Mahsyar, A. (2011). *Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik*. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta CV.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera

Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media

Sugiono. (2016). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: Alfabeta Sugiyono

Widodo, Joko. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Baju Media Publishing.

William N. Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal, 8-11

Winarmo, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prasindo; hal 21